

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pelaksanaan Pembangunan dewasa ini menuntut tersedianya sumberdaya manusia yang berkualitas, karena itu lembaga pendidikan yang merupakan suatu institusi yang diserahi tugas dan tanggung jawab untuk menyiapkan sumberdaya tersebut harus mampu "Mengembangkan semua potensi individu, terutama kemampuan kreativitas, kebebasan berfikir penemuan diri serta pengembangan potensi fisik dan mental sehingga pada akhirnya mereka dapat diharapkan menjadi manusia yang berkualitas dan menjadi warga masyarakat yang fungsional disamping memanusiakan manusia (M. Anshar : 1988:7).

Selain hal yang telah dikemukakan di atas, maka dalam rangka menyiapkan sumberdaya tersebut lembaga pendidikan juga dituntut untuk mampu menyiapkan sumber daya manusia yang sesuai dengan tuntutan



pembangunan, karena gerak pembangunan yang terjadi disegala bidang membutuhkan peningkatan kualitas baik masyarakat maupun aparaturnya yang menjalankan roda pemerintahan (Ateng Syafruddin, 1991 : 141)

Menyiapkan sumberdaya manusia yang sesuai dengan tuntutan masyarakat dan kebutuhan pembangunan bukanlah suatu hal yang mudah, karena untuk keperluan itu diperlukan berbagai upaya dan kebijakan, salah satu upaya dan kebijakan yang harus dilaksanakan dan ditempuh adalah penyelenggaraan sistem pendidikan yang berorientasi terhadap tuntutan pembangunan dan kebutuhan masyarakat, masalah ini tentu tidak berdiri sendiri karena pelaksanaan pendidikan itu sendiri akan terkait dengan berbagai faktor termasuk kurikulum yang diterapkan oleh suatu lembaga pendidikan, oleh karena itu disamping upaya untuk merumuskan orientasi pendidikan juga mengevaluasi dan mengembangkan kurikulum dan isi pendidikan adalah hal yang amat penting karena merupakan wahana pendidikan

agar mampu mewujudkan manusia yang berkualitas yang dituntut oleh pembangunan Bangsa dan sesuai dengan tuntutan pembangunan (GBHN 1993: 96)

Dari uraian di atas, maka khusus untuk Departemen Dalam Negeri sebagai penyelenggara pemerintahan umum yang mempunyai lingkup tugas yang demikian luas sudah barang tentu memerlukan sumber daya manusia yang berkualitas, dalam rangka untuk melaksanakan tugas baik tugas bidang pemerintahan, pembangunan maupun kemasyarakatan, untuk keperluan itu STPDN sebagai instansi pelaksana teknis Departemen Dalam Negeri dalam bidang pendidikan disertai tugas dan tanggung jawab untuk dapat mencetak kader pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang berkualitas, yang pada tahap awal pelaksanaan tugas nya akan diarahkan untuk mengisi formasi organisasi pemerintahan pada jenjang yang paling bawah yaitu pemerintahan tingkat Kecamatan dan Kelurahan.

Dengan penjelasan di atas berarti setiap lulusan STPDN dalam pelaksanaan tugas dan fungsinya akan langsung berhubungan dengan masyarakat yang mempunyai latar belakang yang beragam baik latar belakang sosial budaya maupun latar belakang pendidikan dan status ekonomi, yang kesemuanya akan menuntut kualitas aparatur pelaksana pemerintahan disatu pihak dan kepentingan pemerintah dipihak lain karena seperti diketahui bahwa dalam rangka kelancaran pelaksanaan pembangunan yang tersebar diseluruh pelosok negara, dan dalam membina kestabilan politik serta kesatuan bangsa maka hubungan pemerintah pusat dan daerah atas dasar kestabilan negara kesatuan diarahkan untuk pelaksanaan otonomi daerah yang nyata dan bertanggung jawab yang dapat menjamin perkembangan dan pembangunan daerah dan dijalankan bersama-sama dengan dekonsentrasi.

Pelaksanaan tugas dan fungsi seperti yang disebutkan di atas membutuhkan kualitas aparatur

pelaksana pemerintahan yang semakin meningkat, oleh karena itu penilaian terhadap kurikulum disatu pihak dan upaya untuk memenuhi tuntutan pembangunan dan masyarakat dipihak lain memberikan indikasi kepada kita bahwa pelaksanaan pendidikan haruslah mempunyai relevansi dengan pelaksanaan pembangunan, dengan demikian disamping upaya pemerataan kesempatan memperoleh pendidikan maka upaya peningkatan relevansi antara hasil pendidikan dan tuntutan pembangunan haruslah dipandang sebagai tema yang integral dan konsisten dalam Pembangunan Pendidikan Nasional.

Dalam rangka untuk mewujudkan peningkatan relevansi pendidikan dengan tuntutan masyarakat dan pembangunan, maka penyelenggaraan Pendidikan Nasional perlu ditata, dikembangkan dan dimantapkan ... disertai dengan keterpaduan efisiensi pelaksanaannya sehingga mampu untuk memenuhi tuntutan dan kebutuhan pembangunan, (GBHN 1993 : 94). Penataan

dan penyempurnaan penyelenggaraan pendidikan yang dikemukakan di atas, termasuk penyelenggaraan sistem Pendidikan Tinggi Kedinasan seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN). Upaya untuk menata dan memantapkan penyelenggaraan Pendidikan Nasional tersebut perlu didukung oleh tersedianya sumber daya pendidikan secara bertahap, disertai dengan keterpaduan dan efisiensi pelaksanaannya. Amanat yang tertuang dalam GBHN tersebut di atas mencerminkan betapa pentingnya upaya untuk meningkatkan relevansi pendidikan dengan tuntutan pembangunan, oleh sebab itu upaya peningkatan relevansi pendidikan ini, disamping harus dilihat secara integral dalam pengembangan Pendidikan Nasional juga haruslah dilihat sebagai tema yang sentral.

Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) merupakan suatu lembaga Pendidikan Tinggi Kedinasan yang berada di bawah Departemen Dalam Negeri, dimana dalam pengembangan pendidikannya

dipengaruhi oleh berbagai faktor antara lain adalah kebutuhan masyarakat akan pelayanan terutama dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan yang semakin lama semakin meningkat, sistem nilai yang berkembang dalam masyarakat baik sistem nilai moral maupun sosial politik, sikap dan kebutuhan peserta didik dan lain-lain.

Dari Sekian banyak faktor yang telah disebutkan di atas, maka faktor kebutuhan masyarakat yang demikian beragam dan selalu meningkat mengharuskan STPDN dalam pelaksanaan pendidikannya melihat upaya peningkatan relevansi sebagai suatu hal yang mendesak untuk dikaji karena masalah ini mempunyai kaitan erat dengan tuntutan pembangunan, sehingga STPDN diharapkan dapat menghasilkan keluaran (out-put) yang sesuai dengan tuntutan pembangunan yang semakin kompleks. Pendirian STPDN sebagai suatu lembaga pendidikan diharapkan mampu menghasilkan kader pemerintahan dalam negeri yang didasari oleh semangat untuk memberikan pelayanan secara optimal kepada

masyarakat dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan. Seperti diketahui bahwa secara historis STPDN sendiri sebagai lembaga pendidikan bemula dari masa pemerintahan Hindia Belanda (Bineland Bestuur dan pangreh praja) yang tujuannya untuk mengabdikan kepentingan belanda. Setelah Indonesia merdeka guna untuk mengantisipasi jumlah aparat pemerintahan di Daerah yang mendesak untuk segera dapat dipenuhi, maka dibentuklah Kursus Dinas Ketataprajaan (KDC) yang merupakan asal mula terbentuknya APDN di Malang pada tahun 1956. Dalam perkembangan berikutnya sesuai dengan kebutuhan Daerah terbentuklah Akademi Pemerintahan Dalam Negeri (APDN) yang tersebar di 20 Propinsi seluruh di seluruh Indonesia, dimana secara financial dibiayai oleh Pemerintah Daerah masing-masing sedangkan secara administratif pelaksanaan sistem pendidikannya berada dibawah Badan Pendidikan dan Latihan Departemen Dalam Negeri.

Globalisasi menyebabkan arus informasi sedemikian cepat yang menyebabkan terjadinya perubahan yang demikian cepat pula disegala bidang kehidupan yang pada akhirnya berakibat munculnya tuntutan masyarakat yang semakin hari semakin beragam, maka APDN dengan kurikulum yang masih dianggap kedaerahan (lokal) dipandang sudah tidak memadai lagi terutama dilihat dari posisi jabatan yang berkembang di lingkungan Pemerintahan Dalam Negeri, sehingga APDN perlu dikembangkan dan disempurnakan untuk dapat menghasilkan kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri yang lebih profesional dan berwawasan Nusantara, maka berdasarkan Surat Keputusan Menteri Dalam Negeri No. 8 tahun 1988, 20 APDN yang tersebar di dua puluh Propinsi di integrasikan menjadi satu yaitu APDN Nasional yang berlokasi di Jatinangor Kabupaten Daerah Tingkat II Sumedang Jawa Barat. Sebagai pelaksanaan dari Keputusan tersebut maka pada tahun Akademik 1989 pendidikan APDN yang bersifat Nasional mulai

dilaksanakan di APDN Malang dan APDN Semarang sementara menunggu penyelesaian pembangunan fisik APDN Nasional Jatinangor, setelah pembangunan fisik selesai pada tanggal 18 Agustus 1990, penyelenggaraan pendidikan sepenuhnya dipusatkan di APDN Nasional Jatinangor yang memiliki luas areal kurang lebih 280 Hektar.

Mengingat besarnya bobot pelaksanaan operasional pendidikan APDN yang telah disempurnakan dan merupakan integrasi dari 20 APDN tersebut akhirnya status APDN Nasional ditingkatkan menjadi STPDN (Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri) dengan Keputusan Presiden Republik Indonesia No. 42 Tahun 1992, akan tetapi pelaksanaan pendidikannya masih menggunakan program pendidikan setara Diploma III bidang pemerintahan (meneruskan program APDN) sesuai dengan Kepmendagri No. 85 Tahun 1990 tentang kurikulum APDN. Dengan peningkatan status dari Akademi menjadi Sekolah Tinggi, maka terbuka kemungkinan untuk menyelenggarakan pendidikan dengan

program yang lebih tinggi, yaitu minimal Diploma IV. Peningkatan status ini sebenarnya juga didasari oleh semangat untuk meningkatkan profesionalisme kader aparatur Pemerintahan Dalam Negeri, guna menyongsong Pembangunan Nasional Jangka Panjang tahap II seperti yang di amanatkan oleh Garis-Garis Besar Haluan Negara 1993 (Bab IV bagian f butir 41) yang memberikan arahan yang jelas dimana dikatakan bahwa "Pembangunan aparatur Negara diarahkan untuk mewujudkan aparatur Negara yang handal serta mampu melaksanakan keseluruhan pelaksanaan tugas pemerintahan umum dan pembangunan dengan efisien, efektif dan terpadu yang didukung oleh aparat yang profesional bertanggung jawab, bersih dan berwibawa serta menjunjung tinggi keadilan".

Pendayagunaan aparatur negara terus ditingkatkan terutama yang berkaitan dengan kualitas, efisiensi pelayanan dan pengayoman kepada masyarakat serta kemampuan profesional, hal tersebut merupakan tantangan pekerjaan yang harus ditangani

Hasil studi pendahuluan yang dilaksanakan di Kab. Dati II Sumedang terhadap beberapa orang Camat dan beberapa orang tokoh masyarakat di 4 kecamatan diperoleh informasi bahwa saat ini masih dirasakan adanya kesenjangan antara kemampuan profesi aparatur Pemerintahan dengan tuntutan pekerjaan yang berkembang, bila informasi mengenai kesenjangan kemampuan tersebut di inventarisir maka hampir semua Camat di empat kecamatan yang dijadikan lokasi penelitian mengatakan, bahwa selama ini karena tingkat pendidikan dan pangkat awal yang di sandang oleh lulusan STPDN relatif lebih tinggi yaitu Penata Muda (III/a) sehingga selalu ditempatkan pada kedudukan sebagai advisory staf yaitu staf yang melakukan tugas pemikiran (S.P. Siagian, 1992 : 106) yang mempunyai kaitan erat dengan penyelesaian tugas pokok pimpinan, akan tetapi kurang mampu menerapkan prinsip completed staf work artinya selama ini dalam kedudukannya sebagai advisory staf lulusan STPDN lebih banyak menunggu perintah dari atasan daripada memberikan ide-ide yang memungkinkan pimpinan dapat mengambil keputusan dengan cepat dan tepat, sedangkan

dalam manajemen adalah "tabu mengirimkan ide yang belum matang kepada pimpinan atas dasar mana pimpinan itu diharapkan dapat mengambil keputusan yang baik" (SP Siagian, 1992: 73). Kesenjangan lain dari lulusan STPDN adalah masalah kemampuan adaptabilitas, baik dengan keadaan sosial budaya masyarakat maupun dengan piranti kerja, adaptabilitas dengan keadaan sosial budaya masyarakat bagi lulusan STPDN tidak terdapat masalah yang berarti hal ini diketahui dari 15 orang tokoh Masyarakat yang dimintai informasi hampir 75% (12 orang) mengatakan Lulusan STPDN sangat mudah beradaptasi dengan keadaan sosial masyarakat, dua orang mengatakan mudah beradaptasi dan satu orang mengatakan lulusan STPDN sama dengan lulusan Sekolah lainnya. Bagaimanapun kecilnya kesenjangan seperti yang dikemukakan di atas, harus di atasi dengan peningkatan kualitas melalui pendidikan dan latihan yang sistimatis dan bervariasi, artinya pengembangan sumberdaya manusia dapat dilakukan dengan banyak cara, yang paling utama adalah melalui pendidikan formal mulai dari sekolah dasar sampai akademi dan perguruan tinggi, selain itu

dapat pula dikembangkan ditempat kerja melalui pelatihan yang sistimatis maupun latihan informal (M. M. Papayungan, 1997: 10).

Pengembangan sumber daya manusia lewat pendidikan formal termasuk pendidikan kedinasan seperti Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri (STPDN) yang lulusannya nanti akan melaksanakan penyelenggaraan pemerintahan secara umum, sehingga sistem dan pola pendidikan STPDN sebagai salah satu lembaga pendidikan kedinasan perlu diarahkan dan dirancang guna keperluan tersebut.

Kesenjangan kemampuan profesional aparatur Pemerin tahan seperti dikemukakan di atas dipengaruhi oleh beberapa faktor antara lain: kualitas pribadi lulusan STPDN itu sendiri, kemampuan atau kualitas tenaga pengajar dan pelatih, juga dapat dipengaruhi oleh kurikulum, karena bagaimanapun kualitas lulusan suatu lembaga pendidikan sangat ditentukan oleh keseluruhan unsur-unsur kurikulum lembaga pendidikan yang bersangkutan.

Memperhatikan hasil studi pendahuluan di atas, maka dalam penelitian ini yang ingin dikaji lebih lanjut adalah apakah kesenjangan kemampuan lulusan STPDN dengan tuntutan kerja yang dirasakan masih kurang ada kaitannya dengan kurikulum yang saat ini dilaksanakan di STPDN yang secara operasional telah membekali lulusannya dengan berbagai pengetahuan, ketrampilan serta sikap yang dibutuhkan dilapangan.

Penyusunan Kurikulum pendidikan harus berdasarkan kompetensi yang berorientasi kepada kebutuhan/kepentingan masyarakat dengan demikian kompetensi lulusan akan di pergunakan sebagai titik tolak dalam rangka pengembangan kurikulum, yang kemudian akan dikomparasikan dan di rumuskan serta dianalisis berdasarkan tugas dan fungsi aparatur pemerintahan tingkat kecamatan. Guna mendukung pencapaian kompetensi yang diharapkan ada beberapa persyaratan yang harus dipenuhi oleh suatu kurikulum salah satu persyaratan tersebut adalah adanya struktur mata kuliah keahlian, yang dapat memberikan

dasar pengetahuan yang memadai guna menuju profesionalisme sebagai kader aparatur pemerintahan dalam negeri.

Hasil studi pendahuluan yang dilakukan terhadap kurikulum STPDN diperoleh informasi bahwa terdapat sebanyak 37 mata kuliah keahlian dengan bobot 88 SKS .

Kesenjangan antara hasil pendidikan dengan tuntutan kerja serta kebutuhan masyarakat sebenarnya bukan saja disebabkan karena implementasi kurikulum suatu lembaga pendidikan semata-mata, akan tetapi dapat pula disebabkan karena perubahan-perubahan sosial politik yang ditandai dengan berkembangnya aspirasi masyarakat terhadap kepentingan-kentingan publik, misalnya tuntutan transparansi terhadap pelaksanaan dan pengelolaan pemerintahan, tuntutan terhadap gaya kerja yang lebih demokratis dan lain-lain.

Masalah lain yang dapat berpengaruh terhadap kesenjangan tersebut adalah cepatnya perubahan

peraturan perundang-undangan sejalan dengan tuntutan dan Perkembangan masyarakat. misalnya otonomi Daerah Tingkat I, dan Daerah Tingkat II yang kesemuanya memerlukan restrukturisasi posisi pekerjaan dan kemampuan lulusan lembaga pendidikan sebagai hasil implementasi kurikulum. diluar faktor-faktor yang telah disebutkan di atas maka fokus penelitian ini akan diarahkan terhadap kemampuan lulusan dan tuntutan kerja serta lingkup tugas dan fungsi lulusan STPDN sebagai public service, baik dalam bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan (Inpres No.1 Tahun 1995), sehingga pada akhirnya dapat dirumuskan saran dan rekomendasi untuk perbaikan dan penyesuaian kurikulum STPDN.

Lembaga pendidikan tinggi kedinasan seperti STPDN harus dapat mengantisipasi setiap perubahan yang terjadi, terutama perubahan sosial politik dan peraturan perundang-undangan di atas, untuk itu harus dikembangkan suatu mekanisme yang dapat mengadopsi



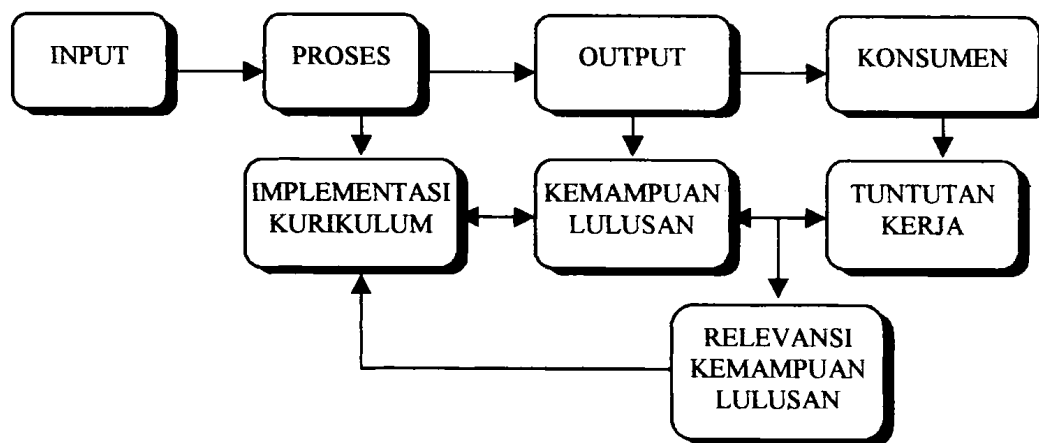
mengadopsi konsep link and match yang telah dilaksanakan pada jenjang pendidikan menengah. Agar supaya konsep kemitraan(link and match) dapat dilaksanakan dengan efektif dan efisien maka penelitian adalah langkah awal yang perlu dilaksanakan untuk mendapat data-data yang mendukung

B. Rumusan Masalah.

Relevansi dalam pendidikan merupakan salah satu kebijakan pendidikan nasional yang apabila dipandang dari sudut sistem maka relevansi mempunyai berbagai dimensi, yakni dimensi input, proses dan out-put. Pada penelitian ini kajian dibatasi pada masalah keluaran/lulusan (out-put) yakni kemampuan lulusan Sekolah Tinggi Pemerintahan Dalam Negeri dalam rangka pelaksanaan tugas pemerintahan secara umum.

Seperti yang dijelaskan di atas bahwa konsep relevansi yang secara operasional diwujudkan dalam link and match (Depdikbud, 1996), adalah merupakan suatu kondisi atau keadaan dimana hasil pendidikan

mempunyai kaitan fungsional dengan kebutuhan masyarakat dan pembangunan, baik dilihat dari segi konsepnya, kebijaksanaannya, perencanaannya, maupun pelaksanaan programnya. Penelitian ini ingin melihat kaitan fungsional antara kemampuan lulusan STPDN dengan tuntutan kerja pemerintahan pada umumnya dan Pemerintahan tingkat kecamatan khususnya, hal ini dilakukan mengingat karier awal lulusan STPDN ditujukan pada tingkat pemerintahan kecamatan dan kelurahan. Secara skematik dapat dikemukakan sebagai berikut :



Gambar: **Relevansi kemampuan lulusan dengan kebutuhan Masyarakat/Tuntutan kerja**

Kemampuan lulusan STPDN merupakan output institusi sebagai hasil implementasi kurikulum. Implementasi kurikulum tersebut tidak terlepas dari sejumlah tujuan-tujuan. Karena itu tujuan kurikulum merupakan sumber untuk mengidentifikasi kemampuan lulusan, sedangkan dilain pihak lapangan kerja mempunyai tuntutan yang bervariasi dan dinamis hal ini mempunyai konsekuensi terhadap kemampuan lulusan. Keterkaitan fungsional antara tuntutan kerja dengan kemampuan lulusan merupakan bahan untuk memberikan pertimbangan atau nilai terhadap relevansi.

Berdasarkan isu di atas, maka inti permasalahan dalam penelitian ini adalah mengkaji lebih lanjut mengenai relevansi kemampuan lulusan STPDN dengan tuntutan kerja pada lingkungan Pemerintahan Tingkat Kecamatan.

Kemampuan lulusan lembaga pendidikan terkait erat dengan kurikulum terutama kurikulum kelompok mata kuliah keahlian oleh karena mata kuliah

keahlian diperkirakan dapat membekali lulusan dengan berbagai kemampuan. Bagi lulusan STPDN dimana tugas dan fungsinya adalah sebagai pelayan masyarakat (*public service*) dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan maka sudah barang tentu memerlukan kemampuan yang diperlukan guna mengantisipasi perkembangan kebutuhan masyarakat terutama menyangkut dengan pelayanan baik bidang Pemerintahan, Kemasyarakatan maupun Pembangunan, penelitian ini difokuskan pada upaya untuk mendapatkan gambaran mengenai kemampuan lulusan serta ruang lingkup tugas dan fungsi aparatur pemerintahan tingkat kecamatan.

Ruang lingkup tugas dan fungsi aparatur tersebut, diharapkan dapat memberikan gambaran terhadap kebutuhan masyarakat akan pelayanan aparatur pemerintahan tingkat kecamatan. Permasalahan pokok tersebut di atas, agar lebih jelas dirumuskan dalam beberapa pertanyaan pokok sebagai berikut :

1. Seberapa luas lingkup tugas dan fungsi aparatur pemerintahan tingkat kecamatan dan kemampuan apa yang secara ideal harus dimiliki oleh setiap lulusan STPDN ?
2. Apakah kemampuan yang dimiliki oleh lulusan STPDN sebagai hasil implementasi kurikulum pengajaran, pelatihan dan pengasuhan mempunyai kesesuaian dengan lingkup tugas dan fungsi aparatur pemerintah tingkat kecamatan?
3. Apakah jumlah dan struktur dan tujuan MKK (Mata kuliah keahlian) yang ada saat ini telah mampu mengantisipasi setiap tuntutan yang terjadi pada setiap pelaksanaan tugas dan fungsi aparatur pemerintah tingkat kecamatan?.

Jawaban mengenai berbagai pertanyaan di atas merupakan rujukan pokok bagi perbaikan kurikulum STPDN yang berorientasi kepada tuntutan kebutuhan masyarakat (*community oriented education*) serta disusun berdasarkan kompetensi (*competency -based curriculum*).

C. Kerangka Pemikiran

Penelitian mengenai relevansi kemampuan lulusan STPDN dengan tuntutan kerja bertitik tolak dari landasan pemikiran sebagai berikut :

STPDN merupakan salah satu lembaga pendidikan tinggi kedinasan yang bermaksud untuk mempersiapkan kader pimpinan Pemerintahan Dalam Negeri yang siap tugas dan siap dikembangkan dalam rangka penyelenggaraan tugas-tugas dibidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan baik di daerah maupun di pusat secara berdayaguna dan berhasilguna.

Nilai relevansi kemampuan lulusan ditentukan oleh ketersediaan pengalaman belajar yang terkait secara fungsional dengan tuntutan kerja.

Nilai relevansi dapat diperoleh melalui evaluasi program yaitu suatu proses pemberian pertimbangan mengenai nilai dan arti dari suatu program/kurikulum (S.Hamid Hasan, 1988). Evaluasi program mempunyai berbagai pendekatan dan model, model evaluasi yang menekankan pada evaluasi

kemampuan lulusan mempergunakan tuntutan kerja sebagai kriterianya. Karena kemampuan lulusan merupakan salah satu produk maka kriteria yang dipergunakan dalam memberi pertimbangan adalah nilai sejumlah kemampuan lulusan dibandingkan dengan tuntutan kerja pada tingkat pemerintahan kecamatan.

Kemampuan lulusan merupakan sejumlah harapan institusional mengenai produk yang secara formal dinyatakan dalam tujuan institusional, kurikuler dan instruksional. dalam rangka untuk mengidentifikasi kemampuan lulusan perlu ditentukan sasaran lulusan STPDN baik dalam bidang pengajaran, pelatihan maupun pengasuhan, dengan demikian sasaran atau tujuan masing-masing program tersebut yang diidentifikasi sebagai kemampuan yang diharapkan dari lulusan STPDN.

Tuntutan kerja merupakan suatu keadaan mendesak yang perlu dipenuhi untuk mencapai produktivitas kerja, tuntutan kerja berasal dari dalam pekerjaan itu sendiri dan luar pekerjaan.

Tuntutan dari dalam pekerjaan berhubungan dengan karakteristik dari masing-masing posisi dan jabatan. Sedangkan tuntutan kerja yang berasal dari luar pekerjaan menyangkut dengan faktor sosial, politik, teknologi dan organisasi, baik yang tumbuh dan berkembang pada organisasi pemerintahan kecamatan maupun yang berkembang dalam masyarakat desa/kelurahan sebagai kesatuan wilayah yang berada pada pemerintahan tingkat kecamatan.

D. Tujuan dan Manfaat Penelitian

Tujuan yang hendak dicapai dengan penelitian ini adalah :

1. Untuk menganalisis ruang lingkup tugas dan fungsi aparatur pemerintahan tingkat kecamatan serta kemampuan apa yang harus dimiliki oleh setiap aparatur dalam melaksanakan tugas sebagai pelayan masyarakat baik dalam bidang pemerintahan, pembangunan dan kemasyarakatan.
2. Untuk menganalisis kemampuan lulusan sebagai hasil implementasi kurikulum mata kuliah keahlian (mkk),

pelatihan dan pengasuhan dalam hubungannya dengan tuntutan kerja yang riil dilapangan.

3. Hasil Penelitian ini nanti diharapkan dapat memberikan sumbangan terhadap STPDN dalam rangka untuk me ningkatkan kualitas kemampuan lulusan guna melaksana kan tugas sebagai aparatur pemerintahan tingkat kecamatan. Hasil penelitian ini juga diharapkan dapat berguna sebagai acuan bagi pengembangan kurikulum yang berorientasi kepada kebutuhan masyarakat, karena masalah yang dijadikan sebagai fokus penelitian ini akan dapat memberikan gambaran tentang kemampuan lulusan STPDN dalam pelaksanaan tugas terutama pada pemerintahan tingkat kecamatan, sehingga masukan dari hasil penelitian ini seyogyanya dapat tercakup dalam kurikulum STPDN terutama mengenai struktur dan tujuan MKK. Disamping itu karena Penelitian ini berhubungan dengan evaluasi produk dan evaluasi program pendidikan dengan demikian akan besentuhan dengan tuntutan kerja dalam ruang lingkup pemerintahan tingkat kecamatan oleh

karena itu hasil penelitian ini akan bermanfaat bagi pengembangan program pendidikan STPDN dalam kaitannya dengan kebutuhan pemakai, yaitu pemerintah an tingkat kecamatan. manfaat yang diperoleh secara rinci dikemukakan sebagai berikut :

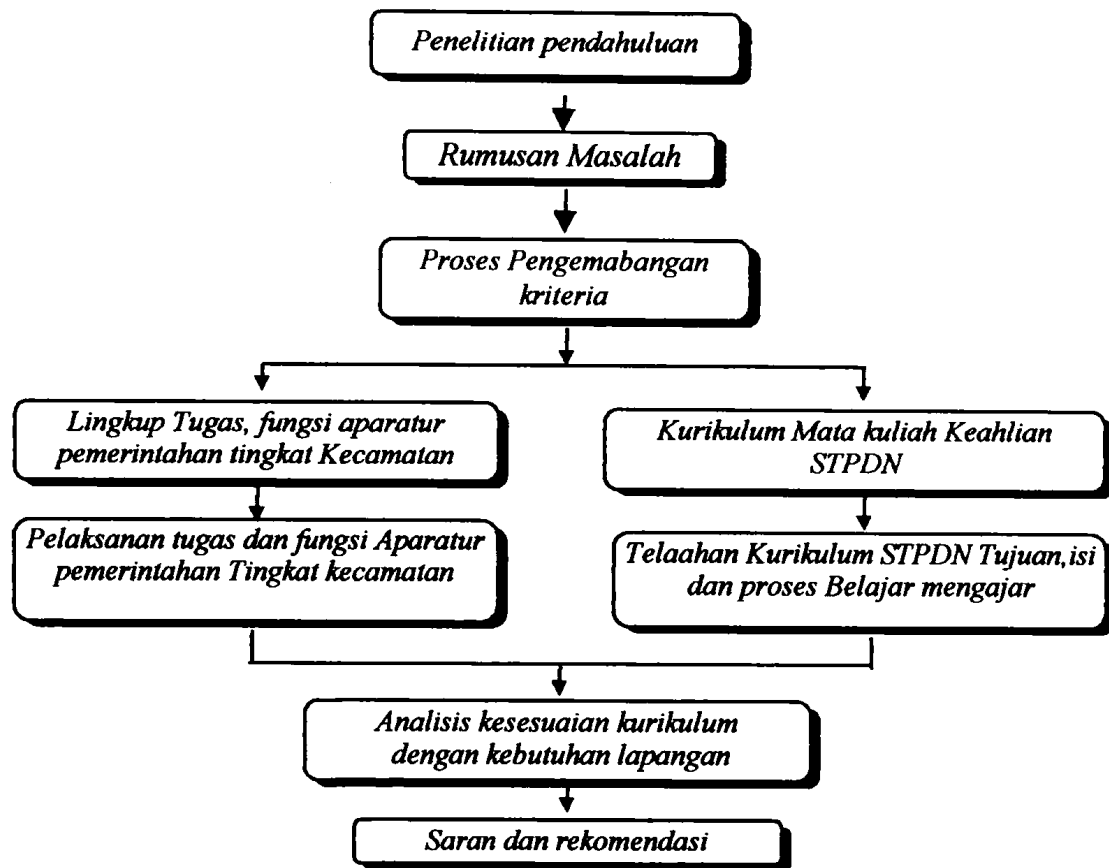
- a) Pada tataran kebijakan strategis, hasil penelitian akan memberikan rekomendasi bagi penyesuaian program kerja sama kelembagaan dalam rangka implementasi kurikulum STPDN.
- b) Pada tataran kebijakan teknis, hasil penelitian bermanfaat bagi pengembangan pola kerja sama antara lembaga dengan pemerintahan daerah.
- c) Hasil penelitian akan pula bermanfaat bagi penjabaran tujuan pendidikan, penyusunan isi, orientasi dan struktur program berdasarkan hasil evaluasi relevansi kemampuan lulusan dengan tuntutan kerja.

Mengenai Anggapan dasar yang dipergunakan dalam penelitian ini adalah bahwa Pendidikan kader

pemerintahan Dalam Negeri ditujukan sebagai public servise baik di bidang Pemerintahan, Pembangunan dan Kemasyarakatan dengan demikian kurikulum STPDN harus berorientasi pada (a) kebutuhan masyarakat akan pelayanan dibidang Pemerintahan, Pembangunan dan kemasyarakatan. (b) Pengembangan kemampuan untuk pemecahan masalah di bidang pemerintahan, Pembangunan serta kemasyarakatan.

E. Proses Penelitian

Agar mendapat gambaran tentang prosedur pelak sanaan penelitian akan disajikan dalam bentuk diagram sebagai berikut :



Gambar : **Diagram Pelaksanaan penelitian**

